

TESIS

**ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA
DI KAWASAN TIMUR INDONESIA**

***ANALYSIS OF THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX AND
FACTORS AFFECTING IT IN EASTERN INDONESIA***

**SRI RAHMAH WAFITRAH
A032202008**



**PROGRAM MAGISTER
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DI KAWASAN TIMUR INDONESIA

disusun dan diajukan oleh

**SRI RAHMAH WAFITRAH
A032202008**



Kepada

**PROGRAM MAGISTER
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DI KAWASAN TIMUR INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh

SRI RAHMAH WAFITRAH
A032202008

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian
Studi Program Magister **Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan**
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin

pada tanggal **13 Februari 2023**

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Rahmatia, SE., MA
NIP. 19630625 198702 2 004

Pembimbing Pendamping,



Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., M.Si., CWM@
NIP. 19770119 200801 2 008

Ketua Program Studi Magister
Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan,



Dr. Indraswati T. A. Reviane, SE., MA., CWM@
NIP. 19651012 199903 2 001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM
NIP. 19640205 198810 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Sri Rahmah Wafitrah

NIM : A032202008

Jurusan/Program Studi: Magister Ekonomi Pembangunan dan
Perencanaan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DI KAWASAN TIMUR INDONESIA

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, 6 Maret 2023

Yang Membuat Pernyataan


Sri Rahmah Wafitrah

PRAKATA

Penulis memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena rahmat, hidayah, serta berkah-Nya yang melimpah memungkinkan penulis menyelesaikan tesis ini. Tesis ini berjudul “Analisis Indeks Pembangunan Manusia dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya di Kawasan Timur Indonesia” dan diharapkan akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia. Penulis juga mengirimkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi panutan bagi seluruh umat manusia dan membawa rahmat bagi semesta alam. Semoga penulis dapat mengikuti jejak perjuangan beliau dan menjadi hamba yang senantiasa taat kepada Allah SWT serta bermanfaat bagi sesama.

Tajuk permasalahan dalam penelitian ini berawal dari fakta bahwa peran pemerintah sangat penting dalam meningkatkan pembangunan manusia, terutama dalam hal pengeluaran fiskal. Peneliti tertarik untuk menyelidiki jenis pengeluaran pemerintah yang paling berkontribusi terhadap pembangunan manusia di Kawasan Timur Indonesia, yang masih memiliki banyak daerah dengan indeks kategori sedang hampir rendah. Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, peneliti menggunakan pendekatan fiskal dengan mempertimbangkan pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sebagai variabel dependennya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan manusia di Kawasan Timur Indonesia.

Harapannya adalah bahwa tesis ini menjadi sebuah karya yang inspiratif dan mendidik bagi para pembaca. Meskipun masih jauh dari kesempurnaan, tesis ini merupakan langkah awal penulis dalam perjalanan menuju pencapaian yang

lebih baik. Diharapkan bahwa karya ini dapat memberikan manfaat positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kehidupan sosial masyarakat serta memberikan kontribusi bagi pembaca. Harapan ini tidak hanya dimiliki oleh penulis, tetapi juga oleh para pembaca yang akan membaca tesis ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan arahan dalam menyelesaikan tesis ini dengan baik. Terima kasih khusus kepada Prof. Dr. Rahmatia, SE., MA. sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., M.Si., CWM® sebagai Pembimbing Pendamping atas dukungan dan bimbingan yang diberikan selama proses penyusunan tesis. Dukungan dan bantuan dari kedua pembimbing ini sangat membantu penulis dalam menyelesaikan tesis tepat waktu dan dengan baik.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Prof Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan selama penulis mengikuti program Magister. Selain itu, penulis berterima kasih kepada seluruh dosen di Program Magister Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya. Tidak ketinggalan, terima kasih kepada tim penguji, yaitu Dr. Madris, DPS., SE., M.Si. CWM®, Dr. Abd.Rahman Razak, SE.,MS., Dr. Hamrullah, SE. M.Si., CSF., dan Dr. Indraswati Tri Abdireviane, SE., MA.,CWM® yang telah memberikan kritik dan saran yang sangat berharga dalam menyempurnakan tesis penulis. Terakhir, terima kasih kepada seluruh staf akademik Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin yang dengan penuh kesabaran membantu penulis menyelesaikan urusan akademiknya.

Penulis juga berterima kasih kepada teman-teman Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Universitas Hasanuddin tahun 2020 dan 2021 serta teman-teman dan sahabat di Pascasarjana Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan semangat, bantuan moral, dan kerja sama yang baik dalam menyelesaikan studinya. Terakhir, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Ayahanda Drs. Jabal Arfah dan Ibunda Zamzam yang telah memberikan bantuan tanpa henti, petunjuk, doa, saran, motivasi, serta keikhlasan dalam menuntut ilmu sehingga penulis dapat mencapai cita-citanya.

Makassar, 6 Maret 2023

Sri Rahmah Wafitrah

ABSTRAK

SRI RAHMAH WAFITRAH. Analisis Indeks Pembangunan Manusia dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya di Kawasan Timur Indonesia. (Dibimbing oleh Rahmatia dan Nur Dwiana Sari Saudi).

Peningkatan pengeluaran pemerintah di Kawasan Timur Indonesia merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan dan pemeratakan pembangunan manusia. Namun indeks pembangunan manusia di Kawasan Timur Indonesia masih di bawah sebagian besar daerah Kawasan Barat Indonesia. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan pengeluaran pemerintah bidang ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Kawasan Timur Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung melalui investasi dan PDRB per kapita.

Penelitian ini menggunakan data panel dengan *cross section* sebanyak 17 dalam rentang waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2015 hingga 2019. Metode analisis yang digunakan adalah metode persamaan struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan pengeluaran pemerintah bidang ekonomi secara langsung berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan investasi dan PDRB per kapita memiliki pengaruh yang positif. Adapun pengaruh secara tidak langsung melalui investasi, pengeluaran pemerintah bidang ekonomi berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Sementara jika melalui PDRB per kapita, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dinyatakan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Apabila melalui investasi dan PDRB per kapita, pengeluaran pemerintah bidang ekonomi memiliki pengaruh yang negatif terhadap indeks pembangunan manusia disebabkan oleh pengaruh yang negatif dari investasi terhadap PDRB per kapita.

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia, PDRB per kapita, Investasi, Pengeluaran Pemerintah.



ABSTRACT

SRI RAHMAH WAFITRAH. *Analysis of the Human Development Index and Factors Affecting It in Eastern Indonesia. (Supervised by Rahmatia and Nur Dwiana Sari Saudi).*

The increase in government expenditure in Eastern Indonesia is an effort by the government to improve and equalize human development. However, the human development index in Eastern Indonesia is still below that of most areas in Western Indonesia. Therefore, the aim of this study is to analyze the impact of government spending on education, health, and the economy on the human development index in Eastern Indonesia, both directly and indirectly through investment and Gross Regional Domestic Product per capita.

This study used panel data with a cross-section of 17 over a period of 5 years from 2015 to 2019. The analysis method used was the structural equation method. The results of the study showed that government spending on education, health, and the economy directly negatively impacted the human development index. Meanwhile, investment and Gross Regional Domestic Product per capita had a positive impact. As for the indirect impact through investment, government spending on the economy had a positive impact on the human development index. However, when through Gross Regional Domestic Product per capita, government spending on education was found to have no effect on the human development index. If through investment and Gross Regional Domestic Product per capita, government spending on the economy had a negative impact on the human development index due to the negative impact of investment on Gross Regional Domestic Product per capita.

Keywords: *Human Development Index, Per Capita Income, Investment, Government Spending*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia.....	12
2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita	14
2.1.3 Teori Investasi.....	15
2.1.4 Teori Pengeluaran Pemerintah	18
2.2 Hubungan Antar Variabel.....	20
2.2.1 Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, PDRB Per kapita, dan Pembangunan Manusia.....	20
2.2.2 Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, PDRB Per kapita, dan Pembangunan Manusia.....	22
2.2.3 Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi, Investasi, PDRB Per kapita, dan Pembangunan Manusia.....	23
2.3 Studi Empiris.....	24
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	30
3.1 Kerangka Konseptual	30
3.2 Hipotesis	32
BAB IV METODE PENELITIAN	34
4.1 Pendekatan Penelitian.....	34
4.2 Lokasi Penelitian	34
4.3 Jenis dan Sumber Data	35
4.4 Metode Pengumpulan Data.....	35
4.5 Definisi Operasional Variabel.....	38
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	40
5.1 Deskripsi Data	40
5.1.1 Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Timur Indonesia. 40	
5.1.2 PDRB per kapita di Kawasan Timur Indonesia.....	41
5.1.3 Investasi di Kawasan Timur Indonesia.....	43

5.1.4	Pengeluaran Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan di Kawasan Timur Indonesia	44
5.1.5	Pengeluaran Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan di Kawasan Timur Indonesia	47
5.1.6	Pengeluaran Pemerintah Daerah Bidang Ekonomi di Kawasan Timur Indonesia	48
5.2	Hasil Estimasi Analisis Model Persamaan Struktural	49
5.3	Pembahasan Hasil Penelitian	57
5.3.1	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui PDRB Per kapita.....	57
5.3.2	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah bidang Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui PDRB Per kapita.....	59
5.3.3	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah bidang Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Investasi dan PDRB per kapita.....	61
5.3.4	Pengaruh Investasi Terhadap PDRB per kapita.....	63
5.3.5	Pengaruh Investasi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	67
5.3.6	Pengaruh PDRB per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	69
BAB VI PENUTUP		70
6.1	Kesimpulan	70
6.2	Saran	72
DAFTAR PUSTAKA		74
LAMPIRAN		83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2019	2
Gambar 1. 2 Belanja Daerah Kawasan Barat dan Timur Indonesia Tahun 2019 .	7
Gambar 1. 3 Perkembangan Total Belanja Daerah Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Kawasan Timur Indonesia	8
Gambar 3. 1 Kerangka Pikir Penelitian	32
Gambar 5. 1 Hasil Penelitian	51

DAFTAR TABEL

Tabel 5. 1 Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2015 hingga 2019.....	41
Tabel 5. 2 PDRB per kapita di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2015 hingga 2019 (dalam rupiah)	42
Tabel 5. 3 Realisasi Investasi di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2015 hingga 2019 (dalam trilliun rupiah).....	44
Tabel 5. 4 Pengeluaran Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2015 hingga 2019 (dalam trilliun rupiah)	46
Tabel 5. 5 Pengeluaran Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2015 hingga 2019 (dalam trilliun rupiah).....	48
Tabel 5. 6 Pengeluaran Pemerintah Daerah Bidang Ekonomi di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2015 hingga 2019 (dalam miliar rupiah)	49
Tabel 5. 7 Hasil Estimasi Fungsi Investasi, PDRB per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia	50

BAB I

PENDAHULUAN

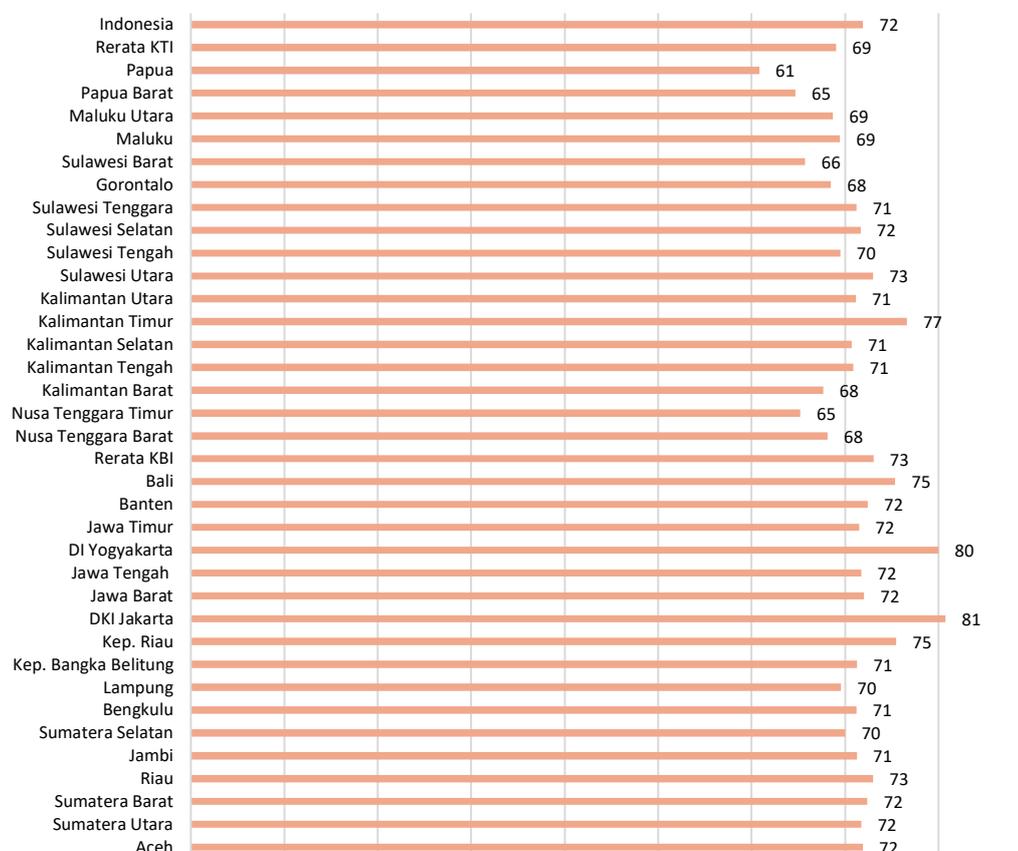
1.1 Latar Belakang

Pembangunan manusia saat ini merupakan tujuan akhir dari aktivitas manusia menggantikan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses memperbesar pilihan seseorang. Yaitu bagaimana seseorang dapat menjalani hidup yang panjang dan sehat, berpendidikan, dan menikmati taraf hidup yang layak. Pilihan tambahan termasuk kebebasan politik, jaminan hak asasi manusia dan harga diri (United Nations Development Programme, 1990). Indeks pembangunan manusia diperkenalkan oleh Mahbub ul Haq dan Amartya Sen yang menganggap bahwa produk domestik bruto (PDB) sebagai proksi kasar dari kinerja ekonomi suatu negara sudah tidak relevan dipergunakan dan menggantinya dengan ukuran yang jauh lebih bermakna (Baumann, 2021).

Di Indonesia, indeks pembangunan manusia sudah tergolong tinggi yaitu sebesar 72 poin. Namun, pembangunan manusia di Kawasan Timur Indonesia masih berkisar di angka 69 poin dengan indeks terendah di Papua yakni 61 poin pada 2019 diikuti Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Barat. Terdapat 9 dari 17 daerah dengan indeks di bawah 70 poin. Sementara di kawasan barat Indonesia sudah tidak memiliki daerah dengan indeks pembangunan manusia di bawah 70 poin (lihat Gambar 1.1). Sehingga dapat dilihat dengan jelas bahwa ketimpangan pembangunan manusia di Indonesia masih menjadi persoalan.

Salah satu penyebab masih belum membaiknya pembangunan manusia di Kawasan Timur Indonesia adalah karena distribusi pendapatan antara

masyarakat kaya dan miskin masih sangat timpang. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh sebagian besar masyarakat yang paling kaya, yaitu sebesar 20 persen dari populasi (World Bank, 2015). Menurut survei lembaga keuangan Swiss, ketimpangan kekayaan antara orang kaya dan miskin di Indonesia termasuk paling buruk di dunia. Berdasarkan survei tersebut, 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional (Credit Suisse, 2017), sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan tercepat ketiga di antara negara-negara G-20 lainnya. Sehingga pertumbuhan ekonomi nasional saja tidak cukup untuk menjamin peningkatan kesejahteraan individu.



Gambar 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2019

Sumber: BPS, 2022

Pertumbuhan ekonomi tidak serta merta mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Kelalaian dalam penyediaan pelayanan dasar berbanding lurus dengan status masyarakat miskin dan rentan. Karena kurangnya layanan dasar, orang miskin tidak dapat hidup layak. Standar hidup masyarakat miskin harus ditingkatkan dengan peningkatan pemerataan akses ke setidaknya pelayanan dasar primer air bersih, makanan, kesehatan yang baik, dan tempat tinggal untuk mencapai tujuan dalam mengakhiri kemiskinan dan ketimpangan (Filho dkk., 2021).

Di negara berkembang, ketimpangan dapat diamati di tingkat regional di mana layanan berbeda di setiap provinsi. Penelitian dari Oxfam (2017) juga menyebutkan bahwa meski terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup baik di Indonesia, pertumbuhan ekonomi tersebut tidak mampu mengurangi ketimpangan pendapatan. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir secara umum terjadi penurunan ketimpangan, dan secara agregat ketimpangan pendapatan di Indonesia tergolong ketimpangan sedang yaitu 0,38 pada September 2019 (BPS, 2022), namun fenomena ketimpangan tersebut masih terjadi hampir merata di seluruh Indonesia. DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Gorontalo, dan Papua adalah contoh dari wilayah di Indonesia yang memiliki ketimpangan tertinggi dengan nilai *Gini ratio* mencapai sekitar 0,43 (Oxfam, 2017). Studi Ghuzini (2021) juga menyebutkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi banyak dijumpai di Kawasan Timur Indonesia.

Kuznets (1955) berpendapat bahwa pengurangan ketimpangan pendapatan dapat diupayakan oleh pemerintah melalui kebijakan pemerintah yang komprehensif dan teruji. Didukung oleh studi yang dilakukan Hung dkk. (2020) bahwa kualitas pemerintahan yang lebih baik akan mendorong pertumbuhan

ekonomi dan mengurangi ketimpangan antar provinsi. Jika dibandingkan dengan kebijakan pendapatan, kebijakan pengeluaran cenderung memiliki efek langsung pada kelompok masyarakat miskin (Zouhar dkk., 2021).

Pentingnya pengeluaran pemerintah bagi pertumbuhan ekonomi merupakan gagasan yang dikembangkan oleh Keynes. Para pendukung hipotesis Keynesian berpendapat bahwa pemanfaatan sumber daya publik yang efisien dapat meningkatkan kapasitas produktif ekonomi dan mendorong pertumbuhan (Hasnul, 2015). Pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan berbanding lurus dengan peningkatan PDRB per kapita masyarakat selama peningkatan populasi tidak lebih besar dari pertumbuhan ekonomi (Jhingan, 2012).

Banyak penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan memberikan kontribusi positif terhadap tujuan publik yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan manusia. Gupta dkk. (1998) menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan dan pendidikan dapat membawa efek positif pada modal manusia yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Doryan (2001) menjelaskan bahwa ketika pemerintah telah menggunakan manfaat pertumbuhan ekonomi untuk membiayai pelayanan kesehatan dasar dan akses pendidikan, maka akan membawa manfaat ganda bagi masyarakat miskin; mereka akan lebih sehat dan berpendidikan lebih baik, dan mereka akan meningkatkan konsumsinya.

Khusus untuk pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, Razmi dkk. (2012) menjelaskan bahwa peningkatan belanja kesehatan akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan meningkatkan pasokan tenaga kerja dan sebagai hasilnya akan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi menyediakan sumber daya sehingga kemudian terjadi peningkatan berkelanjutan dalam pembangunan manusia (Boachie, 2017). Peningkatan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan juga mengurangi angka kematian yang menghasilkan harapan hidup yang lebih tinggi (Boachie dkk., 2018).

Studi lain yang diterbitkan di jurnal *International Journal of Health Policy and Management* menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dapat berdampak pada peningkatan kesehatan dan harapan hidup masyarakat. Studi ini juga menemukan bahwa pengeluaran pemerintah yang cukup pada bidang kesehatan memiliki hubungan positif dengan indeks pembangunan manusia yang lebih tinggi (Lu dkk., 2018).

Sementara itu, pengeluaran pemerintah bidang ekonomi akan berdampak pada peningkatan standar hidup layak melalui peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat atau peningkatan daya beli. Pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dialokasikan untuk menyediakan lapangan kerja maupun fasilitas umum yang memberikan efek pengganda terhadap PDB per kapita. Pengeluaran pemerintah pada bidang ekonomi dapat meningkatkan produktivitas dan aktivitas ekonomi ditengah masyarakat dan pada akhirnya akan meningkatkan daya beli masyarakat (Wardhana dkk., 2021).

Pengeluaran pemerintah juga dapat memberikan efek *crowding in* pada investasi. Dalam model Keynesian standar, peningkatan pengeluaran pemerintah meningkatkan total permintaan yang selanjutnya akan meningkatkan total investasi (Kim dan Nguyen, 2019). Investasi dari negara maju dianggap sebagai unsur integral pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Pemasok domestik, pesaing, distributor, pelanggan, dan karyawan belajar dari interaksi mereka

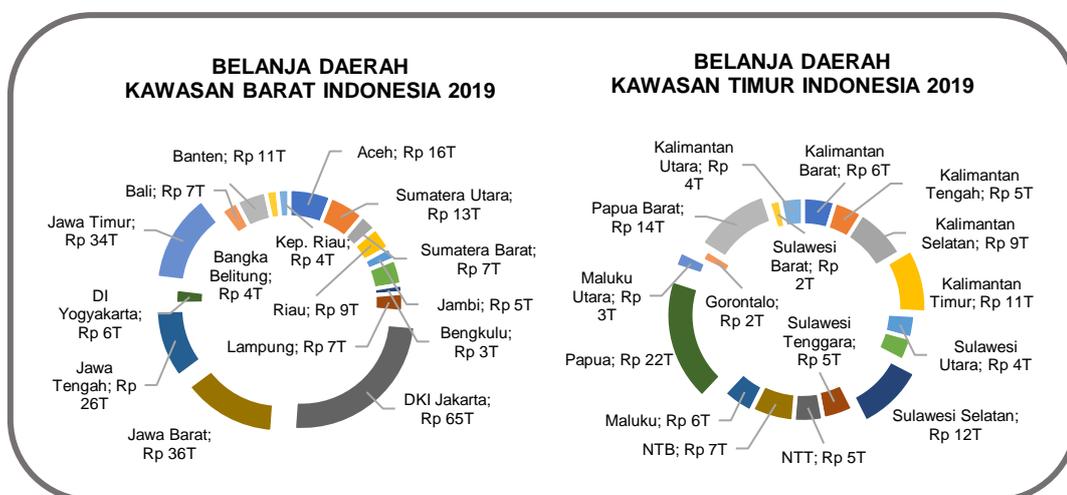
dengan investor asing, dan kemampuan mereka untuk bersaing secara global pun ditingkatkan. Masuknya perusahaan asing yang kompetitif membawa struktur persaingan industri ke tingkat yang baru. Perusahaan lokal yang bertahan dalam lingkungan yang semakin kompetitif ini akan menjadi lebih efisien sehingga dengan demikian lebih kompetitif, lebih produktif dan pada gilirannya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara berkembang dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Reiter dan Steensma, 2010).

Namun ekonom neoklasik dan *New Keynesian*, berpendapat sebaliknya. Menurut mereka kebijakan fiskal ekspansif mungkin memiliki sedikit atau bahkan efek negatif terhadap investasi. Misalnya, proposisi kesetaraan Ricardian berpendapat bahwa konsumen melihat ke depan dan menginternalisasi kendala anggaran pemerintah dalam keputusan konsumsi mereka dan, oleh karena itu, peningkatan pengeluaran pemerintah tidak serta merta meningkatkan total permintaan atau total investasi (Barro, 1979).

Dalam perbandingan belanja daerah di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI), diketahui bahwa rata-rata belanja daerah KBI lebih tinggi dibanding KTI dengan selisih 26 triliun rupiah dan selisih total belanja daerah sebesar 440 triliun rupiah pada tahun 2019. DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan memiliki porsi belanja yang sangat besar dibanding daerah lain di KBI yaitu sekitar 66 triliun rupiah diikuti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Belanja 14 daerah lainnya berkisar dari 3 hingga 16 triliun rupiah (lihat Gambar 1.2). Jelas terlihat adanya ketimpangan belanja daerah yang sangat besar antar provinsi di KBI, namun jika dibandingkan dengan Gambar 1.1, walau dengan belanja daerah yang tergolong sedikit, misalnya, Bangka Belitung (hanya 4 triliun

rupiah), indeks pembangunan manusianya dapat menyentuh angka 71 poin yang merupakan kategori tinggi (lihat Gambar 1.1).

Kawasan Timur Indonesia sebagai fokus pemerintah dalam beberapa tahun terakhir terlihat dari porsi belanja yang cukup besar terutama di Papua (22 triliun rupiah pada tahun 2019, hampir setara Jawa Tengah) dan porsi belanja yang cukup merata di setiap daerah (lihat Gambar 1.2). Namun baik di Papua maupun Papua Barat yang merupakan daerah KTI dengan porsi belanja terbanyak, indeks pembangunan manusia pada dua daerah tersebut merupakan yang terendah di Kawasan Timur Indonesia (lihat Gambar 1.1).

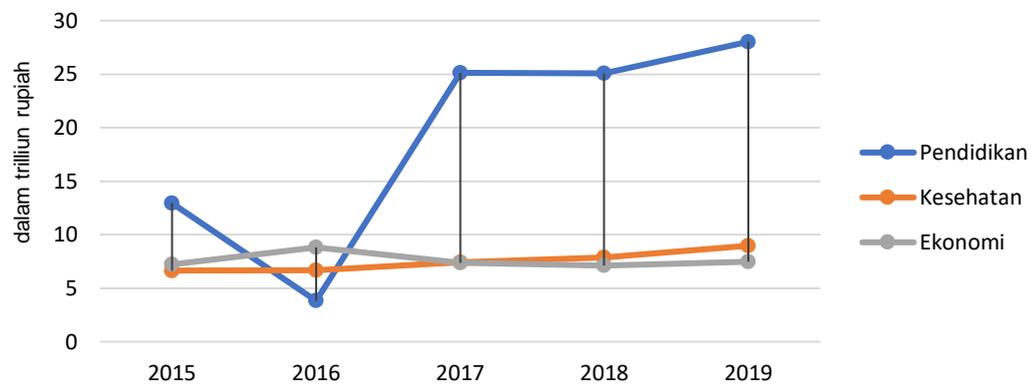


Gambar 1. 2 Belanja Daerah Kawasan Barat dan Timur Indonesia Tahun 2019

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2022

Berdasarkan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, perkembangan total pengeluaran pemerintah di Kawasan Timur Indonesia pada bidang kesehatan dan ekonomi selama 5 tahun dapat dikatakan stagnan. Pengeluaran pemerintah untuk fungsi kesehatan hanya naik sebesar 2 triliun dari 2015 ke 2019. Berbeda dengan pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan dan urusan ekonomi, keseriusan pemerintah daerah dalam membenahi

pendidikan di Kawasan Timur Indonesia dapat terlihat dari anggaran pendidikan yang naik 15 triliun dalam 5 tahun (lihat Gambar 1.3).



Gambar 1. 3 Perkembangan Total Belanja Daerah Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Kawasan Timur Indonesia

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2022

Besarnya porsi pengeluaran pemerintah di beberapa daerah dengan indeks pembangunan manusia yang rendah serta meningkatnya anggaran pendidikan sejak tahun 2017 diasumsikan kurang memberikan dampak positif terhadap indeks pembangunan manusia di Kawasan Timur Indonesia. Asumsi tersebut dijelaskan dalam penelitian World Health Organization (2010) yang menemukan adanya inefisiensi yang signifikan dalam pengeluaran pemerintah, khususnya di antara negara-negara berkembang. Setidaknya sebanyak 20 hingga 40 persen dari pengeluaran kesehatan terbuang percuma.

Menurut Zouhar dkk. (2021), inefisiensi pada pengeluaran pemerintah juga terjadi akibat adanya kegiatan kuasi-fiskal yang terkait dengan perusahaan milik negara yang tidak efisien dan tidak menguntungkan. Selain itu, Barro juga berpendapat bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah dapat menjadi penghambat pertumbuhan dengan menekan pengeluaran sektor swasta, terutama jika pengeluaran tersebut didanai melalui pinjaman (Stratmann dan Okolski, 2010).

Sehingga dalam penelitian ini, keterkaitan antara pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, investasi, dan PDRB per kapita perlu dikaji untuk melihat apakah keseluruhan variabel tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kawasan Timur Indonesia. Karena jika pengeluaran pemerintah hanya terbatas dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka aspek yang lebih penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat akan terabaikan. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian ilmiah dengan judul **“Analisis Indeks Pembangunan Manusia dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya di Kawasan Timur Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah pengeluaran pemerintah bidang pendidikan mempengaruhi indeks pembangunan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB per kapita di Kawasan Timur Indonesia?
2. Apakah pengeluaran pemerintah bidang kesehatan mempengaruhi indeks pembangunan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB per kapita di Kawasan Timur Indonesia?
3. Apakah pengeluaran pemerintah bidang ekonomi mempengaruhi indeks pembangunan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung melalui investasi dan PDRB per kapita di Kawasan Timur Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB per kapita di Kawasan Timur Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB per kapita di Kawasan Timur Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah bidang ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung melalui investasi dan PDRB per kapita di Kawasan Timur Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas maka hasil dari penelitian ini diupayakan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tentang indeks pembangunan manusia di Kawasan Timur Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam memantau perkembangan pembangunan manusia di kawasan tersebut.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya pembangunan manusia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan suatu daerah.
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang melakukan penelitian terkait agar dapat lebih mengembangkan bahasan penelitian.

4. Sebagai rujukan tambahan dalam perencanaan dan strategi pembangunan, sehingga Kawasan Timur Indonesia dapat mengejar ketertinggalan yang dimulai dari peningkatan dalam modal manusia agar indikator-indikator pembangunan manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak dapat terpenuhi .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia pada awalnya didefinisikan dalam *Human Development Report* (laporan pembangunan manusia) tahun 1990 sebagai proses memperluas pilihan manusia. Yang paling penting dari berbagai pilihan ini adalah menjalani hidup yang panjang dan sehat, untuk dididik dan memiliki akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk standar hidup yang layak. Pilihan tambahan termasuk kebebasan politik, jaminan hak asasi manusia dan harga diri pribadi. Laporan tersebut menarik perhatian pada dua aspek pembangunan manusia, yaitu, pembentukan kemampuan manusia, seperti peningkatan kesehatan, pengetahuan dan keterampilan, juga penggunaan kemampuan yang diperoleh seseorang untuk rekreasi, tujuan produktif atau menjadi aktif dalam budaya, sosial dan urusan politik (Baru, 1998).

Ketika kemampuan seseorang ditingkatkan, pilihannya juga meluas dan orang tersebut akan mampu melakukan pilihan tersebut. Menurut konsep pembangunan manusia ini, pendapatan jelas hanya salah satu pilihan yang ingin dimiliki seseorang meskipun hal tersebut penting. Tapi hal itu bukan tujuan akhir dalam hidup mereka. Oleh karena itu, pembangunan harus lebih dari sekadar perluasan pendapatan dan kekayaan, sehingga fokusnya pasti kepada manusia (Baru, 1998).

Sebagaimana tercermin dalam indeks pembangunan manusia, pencapaian tujuan pembangunan sangat bergantung pada pemerintah sebagai penyedia fasilitas penunjang. Menurut Lestari, dkk. (2021) peran pemerintah dalam

mencapai indeks pembangunan manusia yang lebih baik dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta memperkuat infrastruktur dasar seperti transportasi dan sanitasi.

Dalam mencapai tujuan pembangunan, United Nations Development Programme (1990) telah mengidentifikasi empat komponen penting yang harus diperhatikan, yaitu produktivitas, ekuitas, kontinuitas, dan pemberdayaan. Pertama, produktivitas, di mana manusia harus meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi aktif dalam menghasilkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidup. Kedua, ekuitas, yang menjamin bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya ekonomi dan sosial-politik tanpa adanya batasan. Ketiga, kontinuitas, di mana semua sumber daya harus selalu dapat diperbarui dan tersedia bagi generasi saat ini dan mendatang. Terakhir, pemberdayaan, di mana semua orang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memiliki peran aktif dalam memanfaatkan proses pembangunan.

Menurut United Nations Development Programme (1990), Indeks Pembangunan Manusia mengukur hasil pembangunan manusia berdasarkan beberapa komponen kualitas utama yang meliputi umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), berpengetahuan (*being knowledgeable*), dan memiliki standar hidup yang layak (*have a decent standard of living*). Indeks pembangunan manusia terdiri dari 4 kriteria, yakni indeks lebih dari 80 termasuk kategori sangat tinggi, indeks 70 hingga 79 termasuk kategori tinggi, indeks 60 hingga 69 termasuk kategori sedang, dan indeks kurang dari 60 termasuk kategori rendah. (Runtunuwu, 2020).

Jika indeks kesejahteraan dan kemiskinan yang paling umum digunakan didasarkan pada standar absolut yang didefinisikan dalam kaitannya dengan

sekumpulan barang dan jasa tertentu dan seringkali dikaitkan dengan kebutuhan kalori minimum. Maka Indeks Pembangunan Manusia didasarkan pada standar relatif dan mewakili penilaian sejauh mana setiap negara berhasil mencapai nilai maksimum (digambarkan sebagai "memadai" atau "diinginkan") dalam rentang nilai tertentu untuk setiap indikator pembangunan manusia (Kelley, 1991).

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

Ekonom mendefinisikan pembangunan ekonomi dalam hal peningkatan pendapatan atau output riil per kapita. Meier mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai proses dimana pendapatan riil per kapita suatu negara meningkat dalam jangka waktu yang panjang dengan ketentuan bahwa jumlah orang di bawah 'garis kemiskinan absolut' tidak meningkat, dan bahwa distribusi pendapatan tidak menjadi semakin timpang. Indikator pertumbuhan ekonomi ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa untuk pembangunan ekonomi laju peningkatan pendapatan per kapita riil harus lebih tinggi daripada laju pertumbuhan penduduk (Jhingan, 2012).

Teori Kuznet juga menyatakan bahwa salah satu karakteristik pertumbuhan ekonomi modern adalah tingginya output per kapita (Todaro dan Smith, 2005), Pertumbuhan output yang dimaksud adalah Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita atau dalam skala provinsi disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Tingginya pertumbuhan output akan menyebabkan pola konsumsi di masyarakat akan meningkat, selanjutnya akan meningkatkan daya beli masyarakat atau meningkatkan indikator pengeluaran per kapita masyarakat. Walaupun PDRB per kapita dapat menjadi ukuran dalam pembangunan ekonomi, namun masih terdapat beberapa kekurangan yang dijabarkan oleh Jhingan (2012), yaitu:

- 1) Peningkatan pendapatan per kapita mungkin tidak meningkatkan taraf hidup riil masyarakat. Ada kemungkinan bahwa sementara pendapatan riil per kapita meningkat, konsumsi per kapita mungkin turun. Individu mungkin meningkatkan tingkat tabungan atau pemerintah sendiri mungkin menggunakan pendapatan yang meningkat tersebut untuk tujuan militer atau lainnya.
- 2) Ada kemungkinan masyarakat tetap miskin meskipun PDB riil per kapita meningkat jika pendapatan yang meningkat tersebut jatuh ke tangan beberapa orang kaya daripada ke banyak orang miskin.
- 3) Estimasi pendapatan per kapita riil gagal mengukur secara memadai perubahan output akibat perubahan tingkat harga. Angka indeks yang digunakan untuk mengukur perubahan tingkat harga hanyalah perkiraan kasar. Selain itu, tingkat harga bervariasi di berbagai negara. Keinginan dan preferensi konsumen juga berbeda di setiap negara. Oleh karena itu, angka pendapatan nasional dari berbagai negara seringkali menyesatkan dan tidak dapat dibandingkan.
- 4) PDB riil per kapita gagal memperhitungkan masalah yang terkait dengan kebutuhan dasar seperti gizi, kesehatan, sanitasi, perumahan, air dan pendidikan. Peningkatan standar hidup dengan menyediakan kebutuhan dasar tidak dapat diukur dengan peningkatan PDRB per kapita.

2.1.3 Teori Investasi

Terdapat tiga pandangan berbeda mengenai efek dari pengeluaran pemerintah terhadap investasi, yaitu pandangan Neo-klasik, Keynesian dan Ricardian. Menurut pandangan Neo-klasik, *crowding-out* investasi oleh pengeluaran pemerintah terjadi ketika pemerintah memutuskan untuk

meningkatkan pengeluarannya. Neo-classicals menganjurkan bahwa defisit anggaran pemerintah meningkatkan tingkat konsumsi dalam perekonomian. Hal ini karena individu saat ini berpikir bahwa defisit yang ada akan dibiayai melalui pajak yang akan dikumpulkan dari generasi mendatang.

Neo-klasik lebih lanjut menegaskan bahwa karena pengeluaran pemerintah kurang produktif daripada investasi swasta, peningkatan output sebagai akibat dari pengeluaran pemerintah yang dibiayai utang tidak sepenuhnya mengimbangi efek negatif dari *crowding-out* investasi swasta pada output, sehingga mengurangi PDB (Majumer, 2007). Karena pandangan Neo-klasik mengasumsikan bahwa ekonomi pada umumnya berada pada tingkat kesempatan kerja penuh, maka peningkatan konsumsi akan mengakibatkan penurunan tabungan. Karena identitas tabungan-investasi dalam perekonomian, diharapkan suku bunga harus meningkat untuk mengimbangi penurunan tabungan. Kenaikan suku bunga akan membuat investasi kurang menguntungkan. Dengan demikian, investasi akan cenderung menurun. Sehingga, pengeluaran pemerintah akan menurunkan (*crowd-out*) investasi.

Berbeda dengan pandangan Neo-klasik, Keynesian berpendapat bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah merangsang aktivitas ekonomi domestik dan dengan demikian mendorong investasi swasta. Menurut pandangan Keynesian, jarang terjadi suatu perekonomian selalu berada pada tingkat kesempatan kerja penuh. Secara umum, ekonomi berada pada tingkat di bawah kesempatan kerja penuh. Dalam kasus seperti itu, kepekaan investasi terhadap suku bunga akan rendah. Dengan demikian, kenaikan suku bunga sebagai akibat dari ekspansi yaitu peningkatan pengeluaran pemerintah akan tidak begitu tinggi

atau minimal, dan oleh karena itu, tingkat output perekonomian akan meningkat. (Şen dan Kaya, 2014)

Argumen terakhir tentang efek *crowding-out/in* milik pandangan Ricardian yang didasarkan pada teorema kesetaraan Ricardian. Ini menunjukkan bahwa investasi swasta tidak menghasilkan efek *crowding-in*, atau *crowding-out*, dan dengan demikian, investasi swasta dan pengeluaran pemerintah dianggap berperilaku independen satu sama lain. Premis dari pandangan ini adalah bahwa peningkatan belanja pemerintah diantisipasi akan disertai dengan kenaikan pajak di masa depan, jika tidak hari ini (Arestis, 2011). Sehingga pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh penerbitan obligasi publik diharapkan akan dibayar kembali oleh pendapatan yang dihasilkan melalui pajak yang dikenakan di masa mendatang. Oleh karena itu, tingkat bunga dan investasi swasta tetap tidak berubah karena pelaku ekonomi menyadari bahwa pendapatan mereka akan dikenakan pajak di masa depan, dan karenanya, mereka tidak mengubah tingkat tabungan dan konsumsi mereka saat ini.

Selain itu, terdapat teori pertumbuhan endogen yang mengaitkan investasi dengan pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan endogen tercermin dalam persamaan $Y = AK$, dimana A merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi teknologi, sedangkan K mencakup modal manusia dan modal fisik. Investasi (baik investasi fisik oleh perusahaan atau investasi modal manusia oleh pemerintah maupun individu) mengarah pada peningkatan produktivitas. Model ini membuka kemungkinan bahwa peningkatan tingkat investasi modal fisik dan manusia dapat menyebabkan pertumbuhan yang berkelanjutan jika ekonomi eksternal yang kuat dihasilkan oleh investasi tersebut (Chu dkk., 2020).

2.1.4 Teori Pengeluaran Pemerintah

Pentingnya pengeluaran pemerintah bagi pertumbuhan ekonomi merupakan gagasan yang dikembangkan oleh Keynes dalam bukunya "*The General Theory of Employment, Interest and Money*" yang diterbitkan pada tahun 1936. Keynes berpendapat bahwa ketika ekonomi mengalami resesi atau kurangnya permintaan agregat, pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Pendekatan ini dikenal sebagai kebijakan fiskal ekspansif, dan merupakan salah satu dasar teori ekonomi Keynesian (Chude dkk., 2019).

Dalam teori Keynesian, pemerintah dapat meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan fundamental yaitu keseimbangan antara tabungan, konsumsi, dan investasi. Pemerintah dapat merancang kebijakan untuk menyeimbangkan ketiga hal tersebut. Kebijakan pemerintah dapat meliputi pengeluaran pemerintah, seperti program jaminan sosial, subsidi, dan pengeluaran kesejahteraan yang dapat mempengaruhi rumah tangga berpenghasilan rendah. Selain itu, kemampuan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja melalui sarana seperti proyek pekerjaan umum dan industri milik pemerintah juga dapat menurunkan tingkat pengangguran dan pada akhirnya akan mengurangi ketimpangan pendapatan (Stack, 1978).

Stack (1978) juga mengemukakan bahwa keterlibatan pemerintah melalui program penciptaan lapangan kerja dapat menimbulkan efek pengganda. Program penciptaan lapangan kerja tidak hanya menciptakan lebih banyak produktivitas, tetapi juga lebih banyak uang yang dapat diinvestasikan kembali baik di sektor publik maupun swasta. Dampak dari pengeluaran pemerintah, penciptaan

lapangan kerja, dan efek pengganda tersebut berkontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi.

Namun, penentang hipotesis Keynes yaitu Barro (1990) berpendapat bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah dapat menjadi penghambat pertumbuhan, dan menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki potensi untuk mengurangi pertumbuhan dengan membatasi pengeluaran sektor swasta, terutama jika pengeluaran tersebut didanai melalui peminjaman. Selain melalui pinjaman, peningkatan pengeluaran pemerintah dapat juga dilakukan dengan menaikkan pajak (Ahuja dan Pandit, 2020).

Selain pengeluaran pemerintah secara agregat yang dipercaya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah di beberapa bidang tertentu juga secara teoritis terkait dengan kemiskinan dan ketimpangan. Salah satunya adalah pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan. Orang dengan status kesehatan yang buruk tidak dapat melakukan kegiatan dengan baik, sehingga mempengaruhi kesejahteraan mereka secara negatif. Sementara itu, orang yang sehat cenderung memiliki produktivitas yang lebih tinggi daripada orang yang sakit. Karena status kesehatan sangat terkait dengan kesejahteraan rumah tangga (Castro-Leal, 1999). Oleh karena itu, peningkatan kesehatan tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berkorelasi negatif dengan tingkat kemiskinan.

Selain di bidang kesehatan, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan juga merupakan salah satu yang penting. Terdapat anggapan umum bahwa jenis pengeluaran pemerintah ini dapat mengurangi masalah ketimpangan dan kemiskinan. Ketika pemerintah mengeluarkan lebih banyak dana untuk pendidikan, maka akan meningkatkan angka partisipasi sekolah masyarakat

berpenghasilan rendah karena pendidikan menjadi lebih terjangkau (Lokshin dan Yemtsov, 2005). Pada akhirnya, pendidikan yang lebih baik mengarah pada modal manusia yang lebih tinggi, dan meningkatkan modal manusia masyarakat berpenghasilan rendah adalah salah satu solusi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan.

Peningkatan pengeluaran pemerintah dalam bidang ekonomi yang merupakan pengeluaran produktif dapat mempengaruhi insentif untuk berinvestasi dalam modal manusia atau fisik. Sehingga peningkatan investasi akan meningkatkan skala perekonomian suatu wilayah yang menyebabkan PDRB per kapitanya meningkat (Wei dkk., 2001).

Dari ketiga uraian pengeluaran pemerintah tersebut yang merupakan pengeluaran produktif maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi jumlah pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan urusan ekonomi, maka akses ke pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak yang merupakan indikator dari indeks pembangunan manusia dapat semakin meningkat.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, PDRB Per kapita, dan Pembangunan Manusia

Sejak pertengahan 1980-an gelombang teori pertumbuhan baru berfokus pada pengembalian yang meningkat tidak hanya dalam fisik tetapi juga dalam modal manusia dan mengklaim bahwa penggerak utama pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal manusia dan sumber utama perbedaan standar hidup antar negara adalah perbedaan pendidikan dan tingkat keterampilan (Amjad, 2005).

Sejumlah besar penelitian berkonsentrasi pada peran investasi modal manusia dalam menjelaskan tingkat dan variasi dalam produksi dan pertumbuhan

dan telah ditunjukkan bahwa pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan jangka panjang di seluruh negara sebagian besar didorong oleh pertumbuhan produktivitas (Ahmad dkk., 2021). Awan dan Khan (2021) menambahkan bahwa investasi dalam pendidikan adalah faktor kunci dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Mereka juga menyebutkan bahwa pendidikan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mengurangi kesenjangan upah, dan mendorong inovasi dan penemuan teknologi baru, yang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Pendidikan yang lebih berkualitas dapat meningkatkan produktivitas individu maupun ekonomi, mendorong peningkatan pendapatan, dan mengurangi ketimpangan. Pendidikan yang efisien membentuk peluang hidup individu dan memastikan pengembangan keterampilan yang relevan dengan pasar tenaga kerja. Investasi berbasis pendidikan dalam sumber daya manusia akan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan jangka panjang. Sistem pendidikan yang memberi semua anak kesempatan yang sama umumnya dikaitkan dengan prospek pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan rata-rata yang lebih tinggi. Ini berarti mobilitas sosial antargenerasi yang lebih besar dan pengurangan ketimpangan pendapatan di masa depan (Zouhar dkk., 2021). Misalnya, peningkatan persentase pekerja dengan pendidikan menengah ke atas ditemukan terkait dengan penurunan ketimpangan pendapatan tenaga kerja (Fournier dan Koske, 2012).

Tinggi rendahnya PDRB per kapita mencerminkan tingkat daya beli penduduk di suatu daerah, dengan itu semakin besarnya pendapatan maka akan semakin besar juga pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan guna menunjang kesejahteraan hidupnya. Oleh karena itu, PDRB per kapita

berpengaruh positif terhadap capaian nilai Indeks Pembangunan Manusia. Sehingga, apabila PDRB per kapita mengalami peningkatan maka penambahannya juga akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. (Hidayat dan Woyanti, 2021). Penelitian Martins dan Veiga (2014) juga menemukan bahwa porsi belanja yang lebih besar di pendidikan berpotensi menghasilkan tingkat pembangunan manusia yang lebih tinggi.

2.2.2 Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, PDRB Per kapita, dan Pembangunan Manusia

Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan telah digunakan sebagai instrumen fiskal utama untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan manusia. Hasil positif dan signifikan dalam pemanfaatan layanan kesehatan dan status kesehatan di seluruh dunia sebagian besar disebabkan oleh pengeluaran pemerintah untuk kesehatan. Tingkat pengeluaran berkorelasi dengan hasil kesehatan karena cakupan layanan kesehatan cenderung bersifat universal di sebagian besar negara maju, sementara populasi besar di negara berkembang kekurangan akses ke perawatan medis yang berkualitas sehingga menyebabkan rendahnya harapan hidup (Zouhar dkk., 2021).

Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan harus dilakukan untuk menghasilkan manfaat limpahan yang positif bagi sektor swasta yang selanjutnya meningkatkan investasi. Dampak positif dari pengeluaran pemerintah yang ditemukan dalam investasi dikaitkan dengan adanya efek limpahan positif yang dihasilkan dari penyediaan barang kuasi-publik yang layanannya sangat penting untuk berfungsinya ekonomi pasar. Sering dikatakan bahwa pengeluaran pemerintah di jalan dan jalan tol, bandara, pelabuhan, fasilitas listrik dan gas, air dan selokan, fasilitas kesehatan, dan layanan pendidikan cenderung melengkapi pembentukan modal swasta (Ramirez, 2000).

Kesehatan mencerminkan keadaan masyarakat yang sejahtera yang mengarah pada tenaga kerja yang kompeten sehingga dapat meningkatkan pengembangan sumber daya manusia melalui perolehan keterampilan dan pengetahuan. Hal ini mengarah pada fakta bahwa kemajuan dalam pengembangan sumber daya manusia mengarah pada kehidupan yang lebih sehat dan harapan hidup yang lebih besar. Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan membantu meningkatkan taraf hidup, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kemampuan kerja dan produktivitas yang mengarah pada peningkatan pengembangan sumber daya manusia (Erasmus, 2021).

2.2.3 Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi, Investasi, PDRB Per kapita, dan Pembangunan Manusia

Pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur dan modal manusia cenderung meningkatkan produktivitas marginal modal swasta dan akan mendorong lebih banyak investasi. Implikasi penting dari hipotesis substitusi dan komplementaritas adalah bahwa kategori pengeluaran pemerintah yang berbeda dapat menghasilkan efek yang berbeda pada investasi (Wang, 2005).

Pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi akan mendorong kegiatan sektor riil yang memacu terhadap peningkatan PDRB per kapita. Secara tidak langsung pengeluaran pemerintah bidang ekonomi memberikan kontribusi terhadap masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan akan berdampak terhadap perkembangan manusia dalam kesehatan dan pencapaian pendidikan.

Menurut Sahn dan Younger (1999) pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi akan meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap bidang kesehatan dan pendidikan yang dapat meningkatkan potensi penghasilan individu. Pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dialokasikan untuk menyediakan lapangan kerja maupun fasilitas umum yang memberikan efek *multiplier* PDRB per

kapita. Selain itu, pengeluaran pemerintah pada bidang ekonomi dapat meningkatkan produktivitas dan aktivitas ekonomi ditengah masyarakat dan pada akhirnya akan meningkatkan daya beli masyarakat (Wardhana dkk., 2021). Studi Alataş dan Sari (2021) juga menemukan bahwa pengeluaran pemerintah bidang ekonomi merupakan komponen paling penting dari berbagai keseimbangan yang ditemukan dalam total pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan pembangunan manusia.

2.3 Studi Empiris

Penelitian Haque dan Khan (2019) di Arab Saudi dari tahun 1990 hingga 2016 menemukan bahwa pengeluaran pemerintah dan ekspor minyak merupakan pendorong signifikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kajian tersebut memperkirakan bahwa peningkatan produksi minyak sebesar 100 juta barel akan meningkatkan IPM sebesar 4 persen. Demikian pula, peningkatan 1 persen dalam total pengeluaran pemerintah akan meningkatkan 10 persen IPM. Studi ini juga melaporkan bahwa pengeluaran untuk pendidikan memberikan kontribusi paling besar terhadap IPM. Sementara itu, terdapat hubungan terbalik antara pengeluaran kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian Fadilah dkk. (2018) di Jawa Timur dalam periode 2010 hingga 2015 menggunakan *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model* menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi berpengaruh signifikan positif terhadap setiap komponen indeks pembangunan manusia. Selain itu, pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap indeks pendidikan dan indeks pendapatan, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks kesehatan. Lebih lanjut, penelitian ini

memberikan hasil yang berbeda dari pengeluaran pemerintah daerah tertinggal dan daerah maju.

Penelitian Masduki dkk. (2022) di Jawa mencoba mengkaji dan membahas kualitas belanja pemerintah dan kemudian mengaitkan pengaruhnya dengan angka kemiskinan dan indeks pembangunan manusia daerah tertinggal. Metode yang digunakan adalah *Partial Least Squares Structural Equation Model* (PLS-SEM). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas belanja pemerintah didukung oleh konstruk prioritas, alokasi, waktu, akuntabilitas, dan efektivitas. Artinya, belanja pemerintah dapat dikatakan berkualitas jika dilihat dari kelima konstruk tersebut. Hasil penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah yang berkualitas dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Studi Ranjan dan Panda (2022) di India dalam periode 1993-1994 hingga 2014-2015 secara empiris mengkaji pola dan dampak pengeluaran pembangunan terhadap indeks pembangunan manusia dan produk domestik bruto di negara-negara bagian berpenghasilan rendah. Studi tersebut menemukan bahwa pangsa pengeluaran pembangunan dalam beberapa tahun terakhir untuk negara bagian berpenghasilan rendah lebih tinggi daripada negara bagian utama, menyiratkan penekanan pada pembangunan sektor sosial. Studi tersebut juga menyoroti ketertinggalan beberapa negara bagian berpenghasilan rendah seperti Uttar Pradesh, Jharkhand dan Rajasthan. Selain itu, ditemukan bahwa pengeluaran pembangunan memiliki pengaruh yang positif terhadap PDB tetapi tidak pada IPM dalam jangka panjang. Analisis spesifik sektor menunjukkan hubungan ekuilibrium jangka panjang antara pengeluaran pembangunan dan ketiga sektor ekonomi. Walaupun koefisien pengeluaran pembangunan tidak tampak signifikan untuk

indikator IPM, analisis spesifik sektor menunjukkan bahwa peningkatan belanja kesehatan dikaitkan dengan hasil kesehatan yang lebih baik. Memprioritaskan pendidikan, kesehatan dan pengembangan keterampilan, dan pengeluaran pembangunan lainnya akan membantu kemajuan ekonomi.

Penelitian Gökmenoğlu dkk. (2018) di Nigeria untuk periode 1972 hingga 2013 mengeksplorasi dampak investasi asing langsung (FDI) pada indeks pembangunan manusia. Hasil uji kointegrasi Johansen mengungkapkan hubungan jangka panjang antara FDI dan indeks pembangunan manusia (misalnya, pendaftaran sekolah, harapan hidup saat lahir, dan pendapatan nasional bruto). Hasil uji Toda-Yamamoto menunjukkan kausalitas dua arah jangka panjang antara FDI dan harapan hidup saat lahir. Ada juga kausalitas searah dari FDI ke pendapatan nasional bruto. Hasil ini menunjukkan bahwa FDI memiliki dampak yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Nigeria selama periode sampel. Efek FDI terhadap indeks pembangunan manusia merupakan masalah yang rumit, sehingga untuk mendapatkan hasil yang optimal, pembuat kebijakan harus menyadari dan mempertimbangkan pro dan kontra aliran masuk FDI pada beberapa aspek pembangunan manusia. .

Penelitian Ifa dan Guetat (2018) di Tunisia dan Maroko selama periode 1980 hingga 2015 bertujuan untuk menganalisis dampak pengeluaran pendidikan publik terhadap PDB per kapita menggunakan pendekatan *Auto-Regressive Distributive Lags* (ARDL). Hasilnya bahwa dalam jangka pendek, hubungan antara pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan PDB per kapita di Maroko adalah positif sedangkan di Tunisia negatif. Sebaliknya, dalam jangka panjang, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berfungsi untuk meningkatkan PDB per kapita kedua negara, tetapi lebih intensif di Maroko daripada di Tunisia.

Studi Patel dan Annapoorna (2019) di India menggunakan metode deskriptif dan analitik untuk mempelajari hubungan antara pengeluaran pendidikan publik dan pengembangan sumber daya manusia. Untuk menganalisis hubungan antara pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, digunakan Uji Kausalitas Granger. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh pengeluaran pendidikan publik terhadap pengembangan sumber daya manusia di India.

Penelitian dari Hamdi dan Hakimi (2022) menganalisis tentang keterbukaan perdagangan dan investasi asing langsung sebagai faktor pendorong pembangunan manusia di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara menggunakan data dari 13 negara MENA selama periode 2002 hingga 2015. Analisis kointegrasi panel dan model koreksi kesalahan vektor digunakan untuk menguji hubungan jangka pendek dan jangka panjang serta kausalitas antar variabel. Temuan menunjukkan bahwa dalam jangka panjang koefisien keterbukaan perdagangan dan investasi asing langsung secara statistik signifikan. Namun, dalam jangka pendek, hasilnya menunjukkan bahwa hanya investasi asing langsung dan investasi domestik yang memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan manusia.

Kim dan Nguyen (2019) menguji dampak kausal pengeluaran sektor publik terhadap investasi. Mereka menemukan bahwa peningkatan pengeluaran federal mengurangi investasi, pengeluaran *Research and Development*, pertumbuhan lapangan kerja, pertumbuhan penjualan, dan ekuitas tingkat perusahaan. keriang. Efeknya lebih kuat untuk perusahaan yang padat karya, lebih kecil, terkonsentrasi secara geografis, terkendala secara finansial, atau di wilayah dengan lapangan kerja yang lebih tinggi atau tunjangan asuransi pengangguran

yang lebih banyak. Secara keseluruhan, hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah yang positif mengurangi investasi perusahaan dengan merusak peluang investasi perusahaan, dan menyoroti peran signifikan pasar tenaga kerja sebagai mekanisme yang mendasarinya.

Studi Alataş dan Sari (2021) di Turki selama periode 2004 hingga 2018 menyelidiki keberadaan konvergensi dalam pengeluaran publik dan sembilan sub-kategorinya yang berbeda untuk mengungkapkan disparitas regional menggunakan analisis konvergensi klub yang diusulkan oleh Phillips dan Sul. Temuan menunjukkan bahwa kecuali untuk pembelanjaan perlindungan sosial dan lingkungan, total pembelanjaan publik dan tujuh sub-kategorinya memiliki beberapa keseimbangan; terdapat disparitas yang besar antar wilayah, terutama antara wilayah timur dan barat; pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran ekonomi dapat menimbulkan tantangan serius bagi pembangunan jangka panjang; pembelanjaan pertahanan dan ekonomi merupakan komponen paling penting dari berbagai keseimbangan yang ditemukan dalam total pembelanjaan publik.

Sementara itu penelitian Akbar dkk. (2021) di 33 negara OECD untuk periode 2006 hingga 2016 bertujuan untuk memeriksa hubungan dua arah antara pengeluaran kesehatan, emisi karbon dioksida, dan indeks pembangunan manusia. Mereka menggunakan *panel vector autoregression* berdasarkan estimasi *generalized method of moments* untuk menguji hubungan tersebut. Temuan empiris utama mengungkapkan bahwa ketiga variabel utama yaitu pengeluaran layanan kesehatan, emisi karbon dioksida, dan indeks pembangunan manusia menunjukkan hubungan kausal. Kedua, terdapat kausalitas dua arah antara pengeluaran layanan kesehatan dan emisi karbon yang menunjukkan

bahwa emisi karbon secara signifikan meningkatkan pengeluaran kesehatan di negara-negara OECD. Demikian pula, pengeluaran layanan kesehatan juga meningkatkan emisi karena penggunaan energi yang lebih tinggi. Ketiga, sebab-akibat positif dua arah antara pengeluaran layanan kesehatan dan indeks pembangunan manusia mensyaratkan bahwa investasi dalam infrastruktur kesehatan mengarah pada peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan di negara-negara tersebut. Selain itu, indeks pembangunan manusia yang lebih tinggi mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran layanan kesehatan mereka. Keempat, terdapat kausalitas negatif searah antara emisi karbon dan indeks pembangunan manusia yang menyiratkan bahwa emisi karbon secara signifikan memperburuk kesehatan dan kesejahteraan manusia di negara-negara tersebut. Berdasarkan hasil empiris ini, resep kebijakan dibahas untuk otoritas terkait untuk mengurangi emisi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual

Sejak ditemukannya paradigma pembangunan baru yang menghubungkan pertumbuhan dengan peningkatan kualitas hidup, pengeluaran pemerintah dan investasi untuk beberapa sektor ekonomi menjadi semakin penting. Di Kawasan Timur Indonesia, pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan pembangunan manusia sedemikian rupa sehingga diharapkan korelasi positif antara kemajuan dalam pengeluaran di sektor-sektor dengan urgensi yang tinggi. Namun, optimisme ini dapat dicurigai karena meskipun ada pertumbuhan dalam pengeluaran pemerintah, pembangunan manusia di Kawasan Timur Indonesia masih berkisar di angka 69 poin dengan indeks terendah di Papua sebesar 61 poin pada 2019. Sementara di kawasan barat Indonesia sudah tidak memiliki daerah dengan indeks pembangunan manusia di bawah 70 poin (lihat Gambar 1.1).

Dalam mengamankan kemajuan pembangunan manusia, sangat penting untuk menempatkan warga negara di tengah-tengah semua aspek strategi perencanaan pembangunan dan menuntut ketahanan ekstra dari pihak pemerintah (United Nations Development Programme, 1990). Dalam kaitan ini, kesejahteraan warga negara harus terus ditingkatkan untuk menghadapi tantangan baru dan memperluas pilihan mereka yang tidak terbatas dan berubah dari waktu ke waktu. Tiga pilihan kritis dan bernilai sosial yang paling penting dari pilihan-pilihan tersebut adalah pilihan untuk hidup panjang dan sehat, pilihan untuk memperoleh pengetahuan dan dididik serta memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk tingkat kehidupan yang layak seiring dengan perkembangan suatu bangsa.

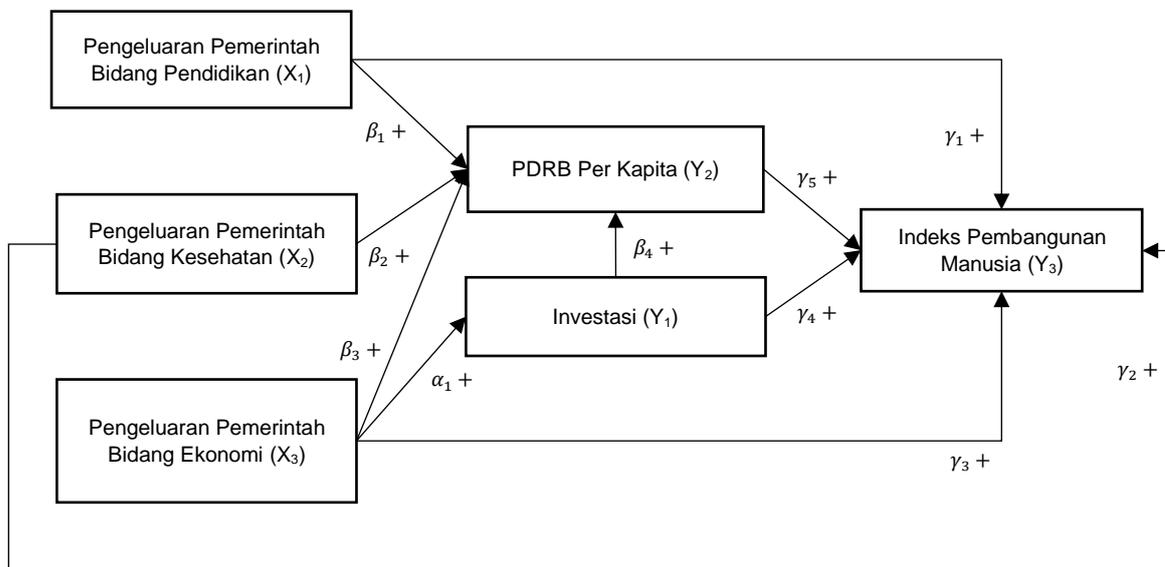
Dengan demikian, pembangunan harus meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi kebutuhan dasar penunjang kehidupan seperti penghidupan yang layak, umur yang lebih panjang, perlindungan diri; peningkatan taraf hidup dan kelestarian lingkungan yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan melalui penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak, pendidikan yang lebih baik dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya.

Tetapi seperti dicatat oleh Todaro dan Smith (2005), banyak negara berkembang yang benar-benar mengalami penurunan pendapatan riil per kapita di antara persentase populasi yang lebih besar dan situasi tersebut secara umum memburuk selama tahun 1980-an. Dalam konteks ini, proses pembangunan pada hakekatnya adalah menciptakan lingkungan di mana semua orang dalam masyarakat dapat memperluas kemampuan yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang yang semakin besar yang tersedia di masyarakat. Jelas dari penjelasan di atas bahwa begitu konsep pembangunan diperluas, pertumbuhan ekonomi menjadi tidak sempurna untuk mengukur atau menggambarkan pembangunan manusia.

Dapat dikatakan dari penjelasan di atas bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah ukuran yang diperlukan tetapi tidak cukup untuk pembangunan manusia. Meningkatkan kualitas hidup jauh lebih penting seperti yang diwujudkan dalam pencapaian pendidikan yang lebih tinggi, akses yang lebih mudah ke pekerjaan dan kehidupan yang lebih sehat, ketahanan pangan dan akses air bersih, perumahan yang terjangkau, lingkungan yang berkelanjutan dan harapan hidup yang lebih besar. Namun dalam mencapai semua ini, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, yang kemudian

mendorong kenaikan investasi dan PDRB per kapita memiliki peran besar. Kajian Salim, dkk. (2020) di Indonesia menyimpulkan bahwa strategi pengutamaan tingkat pengeluaran pemerintah untuk mencapai target menjadi perhatian utama agar siklus ekonomi dapat optimal dan siap menghadapi kemungkinan resesi ekonomi di masa depan yang akan sangat berdampak bagi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi harus terus ditingkatkan oleh pemerintah, tetapi sulit untuk menentukan apakah intervensi pemerintah yang lebih banyak dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah yang kemudian mendorong peningkatan investasi dan PDRB per kapita akan berdampak positif terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat dalam hal ini indeks pembangunan manusia. Maka dari pemaparan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3. 1 Kerangka Pikir Penelitian

3.2 Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini:

1. Diduga pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB per kapita di Kawasan Timur Indonesia.

2. Diduga pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB per kapita di Kawasan Timur Indonesia.
3. Diduga pengeluaran pemerintah bidang ekonomi berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung melalui investasi dan PDRB per kapita di Kawasan Timur Indonesia.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel yang digunakan yaitu pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan pengeluaran pemerintah bidang ekonomi mempengaruhi indeks pembangunan manusia melalui investasi dan PDRB per kapita dalam rentang waktu 5 tahun (2015-2019). Penelitian kuantitatif digunakan untuk melihat adanya hubungan antara pengamatan empiris dengan hasil dari berbagai data yang juga mempunyai tujuan untuk membantu menemukan hubungan antar variabel. Adapun metode deskriptif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian untuk menyampaikan fakta dengan cara mendeskripsikan hasil yang diperoleh.

4.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 17 provinsi di Kawasan Timur Indonesia yang terdiri dari pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Pulau Kalimantan terdiri dari 5 provinsi yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Pulau Sulawesi terdiri dari 6 provinsi yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat. Pulau Maluku terdiri dari 2 provinsi yaitu Maluku dan Maluku Utara. Pulau Nusa Tenggara terdiri dari 2 provinsi yaitu Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Pulau Papua terdiri dari 2 provinsi yaitu Papua Barat dan Papua. Penggolongan tersebut berdasarkan perpres nomor 2 tahun 2015. Pemilihan lokasi ini disebabkan karena Kawasan Timur Indonesia merupakan kawasan dengan indeks pembangunan